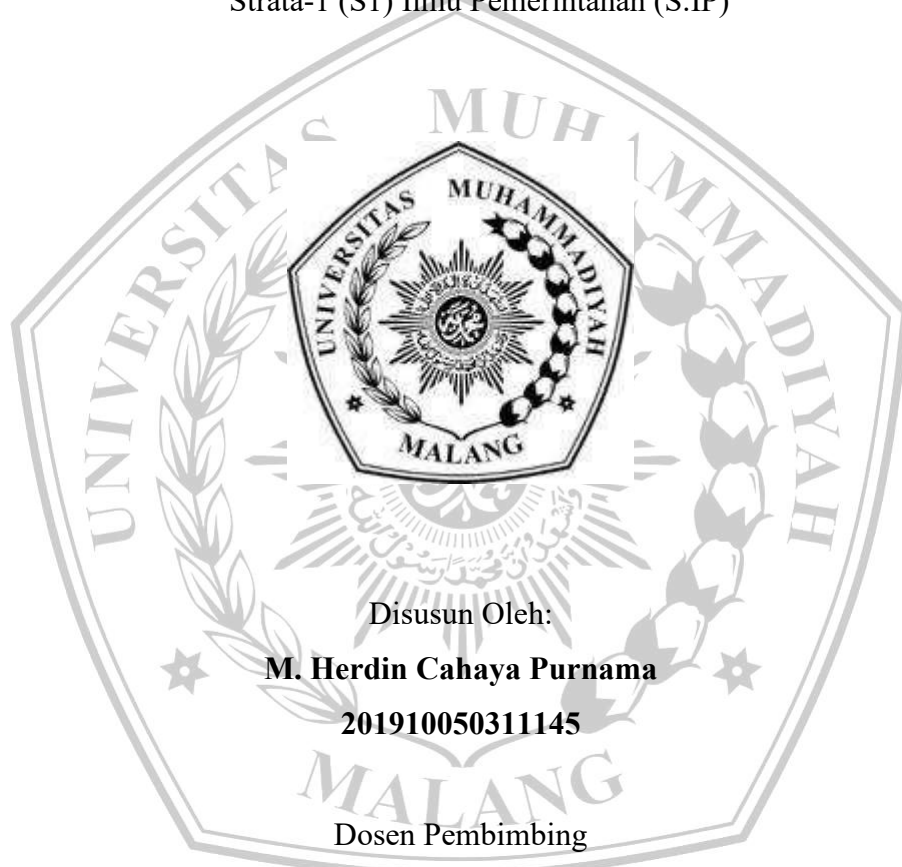


SKRIPSI

**FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN
RAPERDA INISIATIF DPRD
(Studi di Sekertariat DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022)**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1 (S1) Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun Oleh:

M. Herdin Cahaya Purnama

201910050311145

Dosen Pembimbing

Drs. Krishno Hadi, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

**FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN
RAPERDA INISIATIF DPRD
(STUDI DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2022)**

Diajukan Oleh:

M. HERDIN CAHAYA PURNAMA
201910050311145

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Jumat / 26 September 2025*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Drs. Krishno Hadi, M.A

Mengetahui


Najamuddin Kholidur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

M. Herdin Cahaya Purnama
201910050311145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Jum'at, 26 September 2025
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. **Drs. Krishno Hadi, M.A**
2. **Muhammad Kamil, S.IP., M.A**
3. **Prof. Tri Sulistyarningsih, M.Si**


()
()

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Najamuddin Riyal, S.IP., M.Hub.Int.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fsip umm.ac.id | fsip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Herdin Cahaya Purnama
NIM : 201910050311145
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD (Studi di Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2025
Yang Menyatakan,



M. Herdin Cahaya Purnama



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutani No. 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 140 (Hunting)
F. +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 240 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

HALAMAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : M. Herdin Cahaya Purnama
NIM : 201910050311145
Judul TA/Skripsi : Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD (Studi di Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022)
Pembimbing : Drs. Krishno Hadi, M.A

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	5%	10%	13%	4%	2%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd.



September 2025

Ka. Fkgi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan mengangkat judul Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022 dengan baik tanpa ada halangan apapun. Tugas akhir ini disusun berdasarkan apa yang dilakukan di lapangan yaitu yang dilaksanakan di kantor DPRD Kota Surabaya yang beralamat di Yos Sudarso No. 18-22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur.

Tujuan penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan juga untuk Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022. Melalui penyusunan karya tulis ini yang melibatkan kegiatan di lapangan banyak mendapatkan pengalaman berharga, bantuan dan bimbingan, baik bimbingan dari pihak instansi maupun bimbingan dari pihak kampus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Dr. Fauzi Lendriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M. IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Drs. Krishno Hadi, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak mendedikasikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staff Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan sumbang bakti keilmuan dan segala bentuk pengabdianya.
6. Seluruh Staff Tata Usaha IP dan FISIP dalam mengurus administrasi selama masa studi.

7. Bapak Suharto, AMP., S.H., S.Sos., M.T., selaku Kepala Bagian Rapat dan Risalah DPRD Kota Surabaya yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya sebagai instansi yang telah bersedia memberikan kesempatan, ilmu, dan pengalaman kerja kepada penulis.
9. Bapak/Ibu pegawai Sekretariat DPRD Kota Surabaya yang telah bersedia membantu dan memberikan sedikit ilmunya kepada penulis.
10. Kedua orang tua saya Bapak Khaerudin S.Hut dan Ibunda Tersayang Hesti Nur Fariyah S.E yang telah banyak berkorban dan berjuang demi anaknya bisa mengenyam bangku perguruan tinggi, terimakasih tak terhingga dan terimalah skripsi ini sebagai salah satu bentuk dedikasi bukti cinta kasih anak kepada orang tuanya.

Penulis, 26 September 2025

M. Herdin Cahaya Purnama

DAFTAR ISI

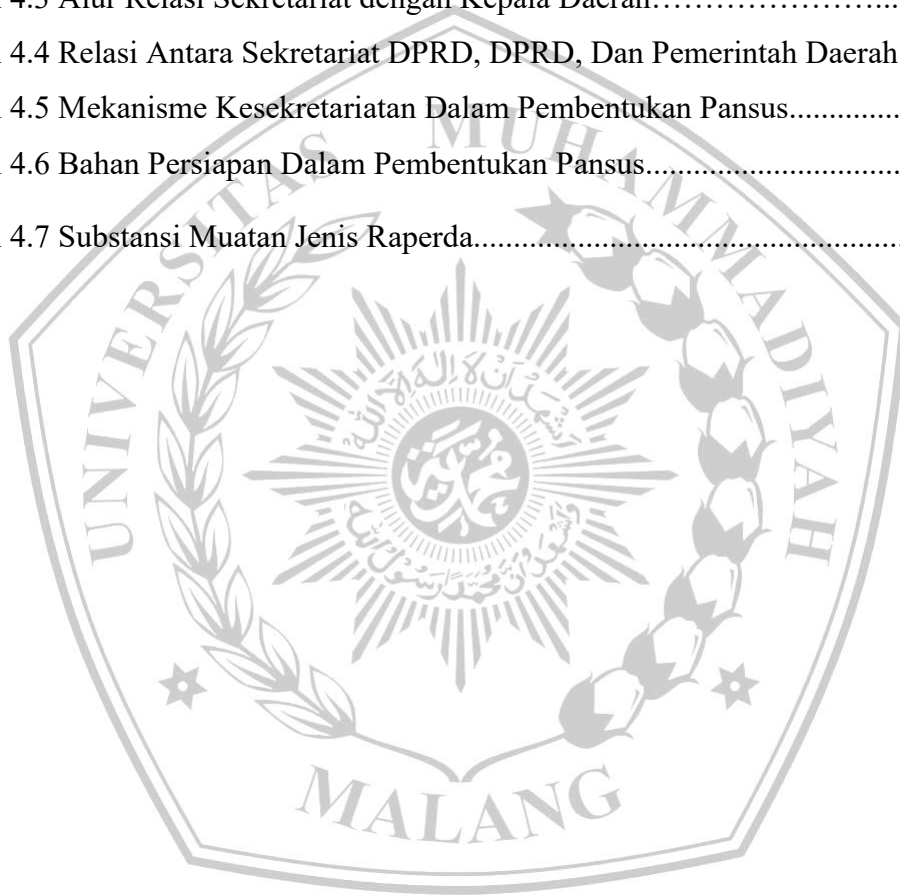
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN CEK PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Definisi Konseptual	7
1.5 Definisi Operasional	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Sumber Data	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.4 Unit Analisa Data	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Pustaka	16
2.2.1 Pengertian Fasilitasi.....	16
2.2.2 Teori Manajemen.....	19
2.2.3 Indikator Fasilitasi	21
2.2.4 Jenis Fasilitasi.....	23
2.2.5 Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif	24

2.3 Sekretariat DPRD.....	24
2.3.1 Pengertian Sekretariat DPRD	24
2.3.2 Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	25
2.4 DPRD	27
2.4.1 Pengertian DPRD	27
2.4.2 Tugas Pokok & Fungsi DPRD	28
2.4.3 Alat Kelengkapan DPRD	28
2.4.4 Relasi DPRD Dengan Kepala Daerah	30
2.4.5 Rancangan Perda Inisiatif DPRD	32
2.4.5.1 Pengertian Raperda Inisiatif.....	32
2.4.5.2 Prosedur Penetapan Raperda Inisiatif	34
2.4.5.3 Proses Penyusunan Raperda Inisiatif	35
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH	41
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Surabaya.....	41
3.1.1 Kondisi Geografis Kota Surabaya	41
3.1.2 Kondisi Demografis Kota	42
3.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya	43
3.3 Fraksi.....	45
3.4 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.....	48
3.5 Badan	51
3.6 Jenis-jenis Rapat DPRD Kota Surabaya	53
3.7 Sekretariat DPRD Kota Surabaya.....	56
3.8 Struktur Organisasi	60
3.9 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD	60
BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	68
4.1 Penyusunan Tim PANSUS	68
4.2 Penyusunan Tim Ahli	72
4.3 Penyusunan Agenda.....	79
4.3.1 Penggandaan Draft Raperda	79
4.3.2 Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Para Pengusul	81

4.3.3	Fasilitasi Pengajuan Rancangan Perda	83
4.3.4	Koordinasi dengan Pimpinan DPRD tentang Penyelenggaraan Rapat Raperda Prakarsa	84
4.3.5	Pendokumentasian Sekretariat DPRD	85
4.4	Substansi Fasilitasi Raperda Inisiatif.....	87
4.4.1	Dukungan Administrasi Atau Mengandung Substansi Politik..	87
4.4.2	Aktor Utama Dalam Proses Penyusunan Raperda Inisiatif.....	88
4.5	Relasi Sekretariat.....	89
4.5.1	Posisi Sekretariat DPRD Dalam Sistem Pemerintah Daerah.....	89
4.5.2	Relasi Sekretariat DPRD Dengan Pemerintah Daerah Di Fungsi Legislasi.....	91
4.5.3	Relasi Antara Sekretariat DPRD, DPRD, Dan Pemerintah Daerah	93
BAB V. PENUTUP.....		102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Relasi DPRD Dengan Kepala Daerah.....	34
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018-2020.....	46
Tabel 4. 1 Daftar Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2023	70
Tabel 4.2 Penentuan Tim Ahli	77
Tabel 4.3 Alur Relasi Sekretariat dengan Kepala Daerah.....	93
Tabel 4.4 Relasi Antara Sekretariat DPRD, DPRD, Dan Pemerintah Daerah.....	95
Tabel 4.5 Mekanisme Kesekretariatan Dalam Pembentukan Pansus.....	96
Tabel 4.6 Bahan Persiapan Dalam Pembentukan Pansus.....	98
Tabel 4.7 Substansi Muatan Jenis Raperda.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 37	
Gambar 3.1 Peta Kota Surabaya	45
Gambar 3.2 Kantor DPRD Kota Surabaya	47
Gambar 3.3 Fraksi DPRD Kota Surabaya	48
Gambar 3.4 Struktur Organisasi DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024... ..	62



M. Herdin Cahaya Purnama, 201910050311145, **FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD (STUDI DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2022)**

Dosen Pembimbing : Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dari penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya dengan alamat Jl. Yos Sudarso No.18 - 22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk mendukung proses penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022, yaitu meliputi: Penyusunan Tim Pansus, yang dibentuk oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap suatu isu atau masalah yang memerlukan investigasi dan pembahasan lebih mendalam sebelum menjadi dasar penyusunan Raperda inisiatif. Penyusunan rencana pembentukan perda terbagi menjadi dua yaitu raperda eksekutif dan raperda inisiatif.

Langkah-langkah penyusunan raperda inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022, yaitu Penyusunan Agenda, dalam hal ini mencakup mengenai 1) Pengandaan Draft Raperda, 2) Fasilitasi kelengkapan administrasi para pengusul, 3) Fasilitasi pengajuan rancangan perda menunjukkan proses yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM untuk memberikan rekomendasi hasil fasilitasi. Fasilitasi ini dilakukan dengan instansi terkait, 4) Koordinasi dengan pimpinan DPRD tentang penyelenggaraan rapat raperda prakarsa 5) Pendokumentasian sekretariat DPRD yaitu berupa salinan berupa tanda tangan dibagian hukum dari Pemkot yaitu sekretariat daerah dari tanda tangan dari walikota. Bagian hukum merupakan bagian yang melakukan pendokumentasian dan merupakan kelengkapan DPRD dalam proses penyusunan perda.

Kata Kunci: ***Fasilitasi, Sekretariat DPRD, Raperda Inisiatif DPRD***

M. Herdin Cahaya Purnama, 201910050311145, **FACILITATION OF DPRD SECRETARIAT IN PREPARATION OF DPRD INITIATIVE REGIONAL REGULATION RAW (Study at Surabaya City DPRD Secretariat for Fiscal Year 2022)**

Supervisor : Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRACT

This study focuses on the Facilitation of the DPRD Secretariat in the Preparation of the DPRD Initiative Draft Regional Regulation for the 2022 Fiscal Year, with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The location of this study is the Surabaya City DPRD Secretariat with the address Jl. Yos Sudarso No.18 - 22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272.

Data analysis consists of three activity flows, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions / data verification. The results of the study indicate that the facilitation of the Surabaya City DPRD Secretariat to support the process of preparing the DPRD Initiative Draft Regional Regulation for the 2022 Fiscal Year, namely: Preparation of a Special Committee Team, which is formed by the DPRD to conduct a more in-depth investigation of an issue or problem that requires further investigation and discussion before becoming the basis for preparing the initiative Draft Regional Regulation. The preparation of the plan to form a regional regulation is divided into two, namely the executive draft regional regulation and the initiative draft regional regulation.

The steps for preparing the DPRD initiative draft regional regulation for the 2022 Fiscal Year, namely the Preparation of the Agenda, in this case are sufficient regarding 1) Duplication of the Draft Regional Regulation, 2) Facilitation of the completeness of the administration of the proposers, 3) Facilitation of the submission of the draft regional regulation shows the process carried out by the Legal and Human Rights Bureau to provide recommendations for the results of the facilitation. This facilitation is carried out with related agencies, 4) Coordination with the DPRD leadership regarding the implementation of the initiative draft regional regulation meeting 5) Documentation of the DPRD secretariat in the form of a copy in the form of a signature in the legal section of the City Government, namely the regional secretariat from the signature of the mayor. The legal section is the section that carries out documentation and is the DPRD's completeness in the process of drafting regional regulations.

Keywords: Facilitation, DPRD Secretariat, DPRD Initiative Draft Regional Regulation

DAFTAR PUSTAKA

- Adrie, O., & Suardita, I. K. (2024). *KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN*.
- Alfi Syifa, M., & Andri, M. (2018). *PERATURAN DAERAH (RAPERDA) (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang)* (Vol. 13, Issue 1).
- Ambarwati, A. (2018). Perilaku dan Teori Organisasi. In *Media Nusa Creative* (Issue April). <https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03558.x/pdf>
- Amirullah dan Haris Budiyo. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Arifuddin. N. (2016). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Yang Partisipatif. *Legal Pluralism*, 6(2), 148–169.
- Bn, H. S., Asmara, G., & Fakultas, Z. D. (2020). PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF EKSEKUTIF OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 314–335. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Fatkurohman, M. S. (2013). *IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP *) KEBENARAN KAIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAE*. 27, 76–86.
- Fernos, J., & Wipi, I. (2023). *PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)*. 3, 647–661.
- Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2005). *Governing by network: The new shape of the public sector*. Brookings institution press.
- Grove., (2004). Principles of Facilitation (Online). Available: http://www.grove.com/about/model_facil.html#model. (2005, July 3)
- Gulo, F., Lase, D., Waruwu, M. H., & Zebua, E. (2022). *Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias*.
- Harahap, A. S., & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 29–42. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/884>

- Husaini, Purnomo, 2008, Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal85.
- Inche Sayuna, 2016, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 17
- Ismanudin. (2020). Optimalisasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Dprd Melalui Peningkatan Peran Kepemimpinan Sekretaris Dprd Kabupaten Kuningan. *Jurnal Aspirasi*, 10(2), 91–97. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/55&ved=2ahUKEwjv3NvYl4H9AhUIALcAHUczDEEQFnoECAwQAQ&usq=AOvVaw2dSflPc_t0nHTpokkSRNz7
- Kenap, A. (2021). PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH. *Lex Administratum*, IX(3), 78–88.
- M Solly Lubis. 2008. Hukum Tata Negara (Cet.VII). Bandung: Mandar Maju.
- Ma'arij, A. (2020). Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum The Essence of the Accountability Statement Regional Heads from a Legal Perspective STIH Muhammadiyah Bima Abstrak. *Jurnal Fundamental*, 9(2), 125–146.
- Maulidya, S. B. P. S. K. R. (2016). PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2009-2014. *Law and Justice*, 5(41), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Moleong, Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuridin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Oktavianus, A. (2022). Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Razali, U. B. (2015). Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(1), 225–257. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.225-257>

- Rika Ramadhanti. (2018). PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rika Ramadhanti. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 249–266.
- Rindengan, B. R. I., Tulusan, F., & Ruru, J. (2016). Peranan Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi Di Skretariat Dprd Kota Tomohon). *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*, 5–24.
- Roger M. Schwarz, *The Skilled Facilitator*, 1994: 9.
- Saiman. (2002). *Manajemen sekretaris / Saiman*. Jakarta :: Ghalia Indonesia,.
- Salamah, S. I., & Umami, N. A. (2020). Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi. *SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)*, 2, 286–292.
- Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604–620. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7>
- Santoso, S. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p1-18>
- Saputra, D. (2021). Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasa. *Journal of Constitutional and Administrative Law*, 01, 35–44. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5903/1/skripsi debi prodi htn.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5903/1/skripsi%20debi%20prodi%20htn.pdf)
- Suko Prayitno, 2017, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm. 114
- Sulastri, E. (2018). *Kinerja Pegawai Subbagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)*. 2.
- Suparto, S. (2019). PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 79. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.87>

- Suprpto Tommy, 2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. Jakarta : Media presindo
- Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 25–36. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119>
- Suwardi, I. (2009). Metode penelitian sosial. In *Bandung: PT. Refika Aditama* (Issue October 2019). https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL/tretDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+DASAR+KAJIAN+PENELITIAN&printsec=frontcover
- Tarigan, M. H., & Ginting, A. H. (2020). MODEL ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN DALAM Mendukung OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Indonesia mengalami pergeseran fundamental pada struktur pemerintahan. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 5(1), 51–66.
- Tata Tertib DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018
- Waruwu, P. (2018). Peran Sekretariat Dprd Kabupaten Nias Barat Dalam Peningkatan Kinerja Dprd Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Prointegrita*, 4(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.565>
- Yayat M. Herujito. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: P.T. Grasindo.